

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggung jawab. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis yang ingin dicapai, sehingga hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai *input*, *output* dan *outcomes* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektif dan efisien kinerja. Apabila efektif dan efisien kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Lembaga Pemerintah pada umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang. Kegiatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat sering menjadi sorotan publik, karena seiring kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari instansi pemerintah tersebut yang dinilai

kurang maksimal seperti dalam persoalan pendapatan dan pembelanjaan anggaran sering terjadi kurangnya perencanaan anggaran, pemborosan dana, penyelewengan dana, dan penyelenggaraan administrasi publik yang kurang efisien dan transparan sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat. Kondisi ini mendorong adanya pemeriksaan dalam kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting dilakukan karena dengan begitu kita dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap tahunnya, sehingga ditahun berikutnya pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya. Menurut Halim (2012) dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengatur keuangan daerahnya.

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut, salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk

dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Renyowijoyo, 2010).

Kinerja Keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh rencana anggaran, dengan alasan yaitu semakin banyak rencana anggaran semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk rencana anggaran belanja tersebut. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.

Dalam penelitian kinerja keuangan menggunakan data pendapatan asli daerah, dimana menurut Halim (2017) PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah untuk memenuhi segala pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan lain yang disahkan. Strategi suatu daerah dalam menyajikan rancangan dana yang bersumber dari daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengelola segala peluang ekonomi daerah tersebut menjadi suatu tindakan ekonomi yang bisa memberikan perputaran dana bagi kesinambungan pembangunan yang ada di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Menurut Halim (2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau juga dikenal dengan Anggaran Daerah adalah suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.

Dipilihnya Kabupaten Kerinci sebagai objek penelitian, dikarenakan Kabupaten Kerinci merupakan salah satu pusat pemerintahan dan perekonomian dalam kawasan Provinsi Jambi, pada penelitian ini kinerja keuangan merupakan indikator tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

pada setiap akhir tahun anggaran, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PAD dan efektivitas realisasi anggaran sebagai acuan untuk menentukan kinerja keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan daerah dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun 2016-2021, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kerinci dari Tahun 2016-2021
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2016	65,00 M	80,85 M	124,39
2	2017	74,24 M	85,76 M	115,52
3	2018	269,54 M	272,06 M	101,14
4	2019	104,74 M	85,90 M	82,02
5	2020	108,19 M	81,67 M	75,48
6	2021	85,91 M	66,89 M	77,87

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id/portal.data/apbd

Untuk tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kerinci tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun, dimana terlihat ditahun 2016 Realisasi PAD sebesar Rp.80,55 M dengan pertumbuhan sebesar 124,39% naik ditahun 2017 menjadi Rp.85,76M atau naik sebesar 115,52%, tahun 2018 Realisasi PAD menjadi Rp.272,06M atau 101,14% dan turun ditahun 2019 menjadi Rp.85,90M atau turun sebesar 82,02% dari tahun 2018, tahun 2020 Realisasi PAD kembali turun menjadi Rp.81,67M atau sebesar 75,48% dari tahun

2019, dan tahun 2020 turun kembali menjadi Rp.66,89M atau sebesar 77,87% dari tahun 2019.

Tabel 1.2.

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kerinci dari Tahun 2016-2021
(dalam miliar rupiah)**

No	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2016	1.132,60 M	1.057,67 M	93,38
2	2017	1.147,84 M	1.201,36 M	104,66
3	2018	1.095,40 M	1.110,49 M	101,45
4	2019	1.327,06 M	1.298,74 M	97,87
5	2020	1.368,15 M	1.203,60 M	87,97
6	2021	1.211,20 M	1.185,94 M	97,91

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id/portal.data/apbd

Untuk tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Daerah pada Kabupaten Kerinci tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun, dimana terlihat ditahun 2016 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.057,67M atau pertumbuhan sebesar 93,38% naik ditahun 2017 pendapatan daerah menjadi Rp.1.201,36M atau sebesar 104,66%, kemudian turun ditahun 2018 menjadi Rp.1.110,49M atau sebesar 101,45% dari tahun 2017, tahun 2019 Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp.1.298,74M atau pertumbuhan sebesar 97,87% dari tahun 2018, tahun 2020 turun menjadi Rp.1.203,60M atau 87,97% dari tahun 2019, tahun 2020 kembali turun menjadi Rp.1.185,94M atau sebesar 97,91% dari tahun 2019.

Tabel 1.3.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kerinci dari Tahun 2016-2021
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Belanja Daerah		Pertumbuhan %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2016	1.188,98 M	1.100,44 M	92,55
2	2017	1.173,34 M	1.176,32 M	100,25
3	2018	1.153,32 M	1.093,15 M	94,79
4	2019	1.394,43 M	1.330,74 M	95,43
5	2020	1.424,05 M	1.229,59 M	86,34
6	2021	1.226,59 M	1.143,50 M	93,23

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.portal.data/apbd

Untuk tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah pada Kabupaten Kerinci tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi atau naik turun, dimana terlihat ditahun 2016 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1.100,44M pertumbuhan sebesar 92,55% naik tahun 2017 belanja daerah menjadi Rp. 1.176,32M atau sebesar 100,25%, kemudian turun ditahun 2018 menjadi Rp. 1.093,15M atau sebesar 94,79% dari tahun 2017, tahun 2019 Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 1.330,74M atau pertumbuhan sebesar 95,43% dari tahun 2018, tahun 2020 turun menjadi Rp. 1.229,59M atau 86,34% dari tahun 2019, tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar Rp. 1.143,50M atau sebesar 93,23% dari tahun 2019.

Hasil Penelitian-penelitian terdahulu masih belum menunjukkan hasil yang konsisten satu sama lain. Muhammad Iqbal, S.E.,M.M. Drs. H. Dani Rachman, M.Si. Siti Rodiah, S.Ak (2021) Menemukan bahwa Rencana Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018. Secara simultan, variabel bebas yaitu rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021 (Studi Empiris pada BPKPD Kabupaten Kerinci)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu luas lingkup penelitian dimana pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dimana menggunakan perhitungan Rasio Efektivitas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dipakai dalam penelitian ini salah-satunya yaitu Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana (X1) menggunakan Realisasi Pendapatan Daerah dan (X2) menggunakan Realisasi Belanja Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh Realisasi APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021?
4. Seberapa besar pengaruh Realisasi APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Realisasi APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Realisasi APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis dapat dijadikan tambahan pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh Realisasi APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi buah pikir untuk pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP), khususnya pengembangan sistem pengendalian manajemen pada sektor publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk mencapai Realisasi APBD yang diinginkan.